Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Asian Development Bank (ADB) Membantu Indonesia untuk Memperkecil *Gender Gap* dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000-2011

Skripsi

Oleh

Kelvin Lian

2015330139

Bandung

2019

Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Asian Development Bank (ADB) Membantu Indonesia untuk Memperkecil *Gender Gap* dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000-2011

Skripsi

Oleh

Kelvin Lian

2015330139

Pembimbing

Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Kelvin Lian
Nomor Pokok : 2015330139
Judul : Upaya Asian Development Bank (ADB) Membantu Indonesia untuk Memperkecil *Gender Gap* dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000-2011

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 9 Januari 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Albert Triwibowo, S.IP., M.A. : _____

Sekretaris
Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D. : _____

Anggota
Y. Purwadi Hermawan, Ph.D. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelvin Lian

NPM : 2015330139

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Asian Development Bank (ADB) Membantu Indonesia untuk Memperkecil *Gender Gap* dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000-2011

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Januari 2019

Kelvin Lian

2015330139

ABSTRAK

Name : Kelvin Lian
NPM : 2015330139
Title : Upaya Asian Development Bank (ADB) Membantu Indonesia untuk Memperkecil Gender Gap dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000-2011

Pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang juga disertai dengan berbagai bentuk ketidaksetaraan gender yang masih sering ditemukan dalam berbagai bentuk seperti subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda dan kekerasan. Hal ini memunculkan perbedaan kapasitas antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Terkait isu ini, Asian Development Bank (ADB) melakukan beberapa upaya dalam membantu Indonesia untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, muncul pertanyaan penelitian: bagaimana upaya Asian Development Bank (ADB) membantu Indonesia untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan Tahun 2000-2011?

Penelitian ini membahas upaya-upaya ADB dengan menggunakan Feminisme Liberal, Kemiskinan Fungsional dan juga disesuaikan dengan Fungsi Organisasi Internasional, *rule-supervisory* dan *operational*. Klasifikasi Organisasi Internasional di sisi lain akan digunakan untuk mengklasifikasikan ADB. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan fungsional dapat ditangani dengan upaya-upaya yang di dorong dengan fungsi organisasi internasional. Melalui upayanya dapat dilihat bahwa ADB telah mengupayakan kapasitas antara laki-laki dan perempuan yang setara dengan tujuan agar *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan dapat dipersempit, walaupun dalam praktiknya, terdapat kendala-kendala yang menjadi tantangan bagi ADB untuk memenuhi tujuannya.

Kata Kunci:ADB, Indonesia, Gender Gap, Pengentasan Kemiskinan, Kemiskinan Fungsional, Rule-supervisory, Operational, Feminsme Liberal

ABSTRACT

Name : Kelvin Lian
NPM : 2015330139
Title : Upaya Asian Development Bank (ADB) Membantu Indonesia untuk Memperkecil Gender Gap dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000-2011

Economic growth that is not proportional to the level of poverty in Indonesia which is also followed by gender equality still frequently found in several forms such as subordination, marginalization, stereotypes, double burden and violence. Thus, it raises differences in capacity between men and women, giving rise to a gender gap in poverty alleviation in Indonesia. Related to this matter, ADB made several efforts in helping Indonesia to narrow the gender gap in poverty alleviation. Hence, the research question that arise: how were the efforts of Asian Development Bank (ADB) in assisting Indonesia to minimize the gender gap in the alleviation of poverty in 2000-2011?

This research discusses ADB's efforts using Liberal Feminism, Functional Poverty and also adapted to the Function of International Organization, rule-supervisory and operational. Besides, the International Organization Classification is used to classify ADB. The result of this research shows that functionalist poverty issues can be addressed by the efforts that are driven by the function of international organization. Through its efforts it can be seen that ADB has sought equal capacity between men and women with the aim that the gender gap in poverty alleviation can be narrowed, even though practically, there are obstacles that pose challenges for ADB to fulfill its objectives.

Keywords: ADB, Indonesia, Gender Gap, Poverty Alleviation, Functional Poverty, Rule-supervisory, Operational, Liberal Feminism

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Penelitian ini membahas tentang upaya ADB membantu Indonesia untuk memperkecil gender gap dalam pengentasan kemiskinan dalam periode tahun 2000 hingga 2011. Budaya patriarki merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan kapasitas perempuan dan laki-laki di Indonesia. Perbedaan yang terjadi berpengaruh terhadap kemampuan dari tiap-tiap gender untuk keluar dari permasalahan kemiskinan dalam masyarakat. Isu tersebut mendorong ADB ikut membantu Indonesia untuk memperkecil gap yang ada antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai upaya berbasis gender yang dilakukan. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mendeskripsikan upaya-upaya sebuah organisasi internasional dalam membantu suatu negara anggotanya untuk memperkecil gender gap dalam pengentasan kemiskinan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan sangat baik. Walaupun, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan, maka penulis sangat terbuka dan mengharapkan adanya kritik dan saran/masukan yang bersifat membangun untuk dapat memenuhi pertanyaan yang mungkin belum terjawab dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Tuhan YME,

Terima kasih kepada Tuhan YME, atas berkat dan tuntunan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.

Kepada Keluarga Lian,

Terima kasih untuk Mami, Papi, Kiki, dan Iie Yana yang selalu memberikan dukungan untuk Kelvin dalam menjalankan studinya selama 3,5 tahun di Universitas Katolik Parahyangan. Terutama buat mami yang selalu peduli dan nelfon untuk nanyain kabar hampir di tiap harinya. Terima kasih juga untuk keluarga besar Mukti , sepupu", iie" yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas dukungan dan doanya.

Kepada Hillery Andani,

Can't thankyou enough for this one udah mau jadi *significant others gue* selama kurang lebih 3,5 tahun ini. Sudah saling dukung dan juga berkompetisi bareng dalam segala hal (*literally*) yang pada akhirnya membuahkan hasil kita bisa lulus bareng. Terima kasih juga udah sabar menghadapi *gue* yang temperamen dan moodyan ini hehe. Yuk kita kerja, sukses bareng terus *planning* trip bareng lagi.

Kepada Dosen-Dosen HI Unpar,

Terima kasih untuk seluruh dosen HI Unpar yang telah membimbing dan mengajar saya selama kurang lebih 3,5 tahun ini, baik melalui kelas akademis maupun melalui kegiatan non-akademis. Terutama untuk dosen pembimbing saya, Elisabeth A.S. Dewi, saya bersyukur dan berterima kasih karna sudah mau membimbing, memberikan motivasi dan juga saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Kepada IJIB,

Teruntuk Riri, Santi, Agi, Carol, Noya, Sabna, Terry dan Ferdin, terima kasih untuk sudah bersama-sama *through ups and downs* selama perkuliahan ini, berbagi pengalaman hidup dan juga membuat kenangan bersama yang indah untuk dikenang nanti. *Gue* berharap kita benar-benar bisa mewujudkan "Reunian

carol udah bawa anak dan suaminya" dan "santi sudah jadi ibu pejabat batak" di kemudian hari.

Kepada Sahabat-Sahabat Logistik 15, 16, dan 17,

Teruntuk logs seangkatan *gue*, Taen, Bagong, Dodit, Nando, Hilda, Nadira, Carol, Agi, Bom, Keenan, Ce, Keco, Andrew, Yazid, Gava, Iva, Thalia, Sue, Nazal, dan Ernest, terima kasih untuk kebersamaannya dan kehangatannya selama dua tahun ini, *gue* yakin banget tanpa kalian hidup perkuliahan *gue* akan "asyik" dan membosankan.

Kepada Inkor METAMORFOSA 2018

Terima kasih untuk kalian-kalian semua yang sudah percaya dan bersama-sama saling bantu membantu untuk mewujudkan kesuksesan OSFAK dan BAKDES. Berkat kalian semua, *gue* jadi punya cerita hidup yang istimewa selama perkuliahan. Tidak lupa, untuk Bri dan Santi, terima kasih banget sudah mau 24/7 bareng *gue* untuk menjalankan hari-hari berat selama OSFAK dan BAKDES.

Kepada CNR,

Teruntuk Angga, Wilson dan Imel terima kasih juga untuk dukungan, motivasi dan bantuan teknis untuk bangunin *gue* kelas pagi di awal perkuliahan walaupun hanya via telfon. Bersyukur banget kita masih bisa *keep contact* dan masih maen bareng tiap kali kalau lagi sama-sama pulang ke Palembang.

Kepada Sahabat-Sahabat Gajyah,

Andri Watto Putra, Fajrina Nadira, Hillery Andani yang selalu siap setiap saat untuk cabut kemanapun dan kapanpun untuk menggajah bareng. Yuk kita agendakan lagi *staycation* di lain kesempatan.

Kepada Sahabat-Sahabat Malam,

Terima kasih untuk Riri, Carol, Agi, Yazid, Dodit, Santi, Nando, Taen, Hilda, C, Vito, Noya, Nadira, Andri, Keenan yang sudah mau berbagi "momen-momen malamnya" bareng *gue*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GRAFIK ..... **ix**

DAFTAR BAGAN ..... **ix**

DAFTAR SINGKATAN ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah **1**

1.2 Identifikasi Masalah **5**

1.2.1 Pembatasan Masalah 9

1.2.2 Perumusan Masalah 10

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian **10**

1.3.1 Tujuan Penelitian 10

1.3.2 Kegunaan Penelitian 11

1.4 Kajian Literatur **11**

1.5 Kerangka Pemikiran **14**

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data **20**

1.6.1 Metode Penelitian 20

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 20

1.7 Sistematika Pembahasan **21**

BAB II ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM SEKTOR FINANSIAL **22**

2.1 Latar Belakang Dibentuknya Asian Development Bank (ADB) **22**

2.2 Tujuan dan Fungsi Asian Development Bank (ADB) 24
2.3 Struktur Organisasi ADB 26
2.4 Keuangan dan Pendanaan ADB 32
2.5 Operasional ADB di Asia Pasifik 34
2.6 ADB di Indonesia 36

BAB III HUBUNGAN ANTARA *GENDER GAP* DAN KEMISKINAN FUNGSIONAL 39
3.1 Definisi Kemiskinan Fungsional 39
3.2 Faktor Penyebab Kemiskinan Fungsional di Indonesia 41
3.3 Konseptualisasi Ketidaksetaraan Gender dan *Gender Gap* dalam Pengentasan Kemiskinan 44
3.3.1 Bentuk Ketidaksetaraan Gender di Indonesia 46
3.4 Kemiskinan Fungsional sebagai pemicu *Gender Gap* dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 58

BAB IV UPAYA ADB MEMBANTU INDONESIA UNTUK MEMPERKECIL *GENDER GAP* DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN 63
4.1 Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Pedesaan 64
4.2 Penyediaan Akses Keuangan Formal dan Pelatihan Usaha Mikro melalui Pembentukan *Community-Based Savings and Loan Organization* (CBSLO) 68
4.3 Pengembangan Institusi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 73
4.4 Pengembangan Kapasitas Sekolah untuk Pendidikan Dasar Melalui Rehabilitasi Fasilitas dan Peningkatan Kualitas 77
4.5 Pengembangan Kapasitas Domestik melalui Pembentukan dan Pengimplementasian *Capacity-Building Action Plan* (CB-AP) dan Peningkatan Kompetensi Penyedia Jasa 83
4.6 Pemantauan 88

BAB V KESIMPULAN 92

DAFTAR PUSTAKA 98

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbedaan Penghasilan menurut Jenis Kelamin dan Lokasi 53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Partisipasi Perempuan dan Laki-laki dalam Sektor Pendidikan 50
Grafik 3. 2 Persentase Penduduk Buta Huruf Usia 10 Tahun ke atas Tahun 2000-2004 59

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi ADB 26

DAFTAR SINGKATAN

ADB : *Asian Development Bank*

ADF : *Asian Development Fund*

ATF : *Asian Tsunami Fund*

CB-AP : *Capacity-Building Action Plan*

CBPM : *Community-based planning mechanism*

CBSLO : *Community-Based Savings and Loan Organization*

CEDAW : *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

DEDPs : *District Education Development Plans*

DEO : *District Education Office*

DGCVE : *Directorate General of Community and Village Empowerment*

DPD : *Dewan Perwakilan Daerah*

DPR : *Dewan Perwakilan Rakyat*

ECAFE : *Economic Commission for Asian and The Far East*

GAP : *Gender Action Plan*

GDI : *Gender Development Index*

IGO : *Intergovernmental Organization*

IRM : *Indonesia Resident Mission*

JFPR : *Japan Fund for Poverty Reduction*

JSF : *Japan Special Fund*

JSP : *Japan Scholarship Program*

KM : *Kilometer*

LAN : *Lembaga Administrasi Negara*

NCBRB : *National Capacity-Building Review Board*

NGO : *Non-Governmental Organization*

NRC : *National Resource Centre*

NTB : *Nusa Tenggara Barat*

NTT : *Nusa Tenggara Timur*

O&M : *Operasi dan Pemeliharaan*

OCR : *Ordinary Capital Resources*

PEF : *Pakistan Earthquake Fund*

PHK : *Pemutusan Hubungan Kerja*

PNS : *Pegawai Negri Sipil*

SD : *Sekolah Dasar*

SDF : *School Development Fund*

SDM : *Sumber Daya Manusia*

SDPs : *School Development Plans*

SFR : *Special Fund Resources*

SKPD : *Satuan Kerja Perangkat Daerah*

SLTP : *Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*

SMA : *Sekolah Menengah ke Atas*

SMU : *Sekolah Menengah Umum*

TASF : *Technical Assistance Special Fund*

TOT : *Training of Trainers*

TOTM : *Training of Managers*

UPP : *Unit Pelaksanaan Proyek*

YDA : *Yayasan Duta Awam*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu isu global yang kini sering kali diperbincangkan.[1] Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi suatu kemampuan suatu pihak tertentu mengalami degradasi sehingga menjadi lebih rendah dibandingkan pihak lainnya. Kondisi seperti ini kemudian akan selalu ada dalam suatu masyarakat tertentu dan tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan pihak dengan kemampuan yang lebih rendah daripada lainnya dibutuhkan fungsinya dalam masyarakat. Kondisi ini kemudian juga dapat direfleksikan melalui kesenjangan kemiskinan yang tercipta antarnegara.[2] Negara–negara di dunia dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu negara dunia pertama, kedua dan ketiga.[3] Negara dunia pertama adalah mereka, negara-negara maju yang memiliki karakteristik tingkat pertumbuhan perekonomian yang

[1] Nuraini Chandrawati. (2005), "Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan" *Jurnal Global,* 2005, Vol. 8 No.3, hlm 39

[2]Max Roser dan Esteban Ortiz-Ospina, "Global Extreme Poverty" *Our World in Data*, https://ourworldindata.org/extreme-poaverty (diakses pada 18 Februari 2018)

[3]Benjamin Ashaver Teryima, "Poverty, Inequality and Underdevelopment in Third World Countries: Bad State Policies or Bad Global Rules?" *IOSR Journal Of Humanities And Social Sicence,* 2013, Vol. 15 No. 6, hlm. 34 https://pdfs.semanticscholar.org/48be/085f7f1bb123d3d4a4d56259469f8308b780.pdf (diakses pada 18 Februari 2018)

tinggi dan mampu melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri. Berbeda dengan negara dunia kedua dan ketiga. Negara dunia kedua adalah negara dengan karakteristik tingkat pertumbuhan ekonomi menengah dan hanya memiliki kapabilitas untuk memproduksi barang mentah menjadi barang setengah jadi sedangkan negara dunia ketiga adalah negara–negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah serta merupakan negara penyedia barang–barang mentah.

Namun, negara dunia kedua dan ketiga sama-sama dikenal dengan karakteristik tingkat ketergantungan yang tinggi di mana mayoritas negara–negara tersebut belum bisa menjalankan perekonomiannya secara mandiri, yakni negara masih sangat bergantung pada negara dunia pertama, khususnya dalam hal teknologi dan tenaga ahli. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi di negara dunia kedua dan ketiga sering kali terhambat, diperburuk lagi dengan adanya kecenderungan praktik monopoli yang biasanya dilakukan oleh negara maju. Pada akhirnya kondisi seperti ini memicu timbulnya kesenjangan tingkat kemiskinan antarnegara dunia pertama, kedua dan juga ketiga.[4]

Di Indonesia, isu–isu kemiskinan untuk pertama kalinya mendapat perhatian secara nasional, yakni pada tahun 1992 di masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan dikeluarkannya *The Incidence of Poverty in Indonesia*.[5] Meskipun adan keseriusan Indonesia dalam mengupayakan isu kemiskinan sebagai salah satu fokus kepentingan negara, jumlah penduduk miskin di

[4] *Ibid*.
[5] [5] "Penduduk Miskin di Indoneisa (Persen) 1990-2015", *Databoks*, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/penduduk-miskin-di-indonesia-persen-1990-2015 (diakses pada 18 Februari 2018)

Indonesia tetap meningkat. Pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin di Indonesia, mencapai angka 13,4 persen untuk penduduk kota dan 13,8 persen untuk penduduk desa. Jumlah tersebut terus meningkat secara fluktuatif hingga pada tahun 2000 menyentuh angka 14,6% untuk penduduk kota dan 22,38% untuk penduduk desa. Kondisi seperti ini bukan merupakan pertanda baik bagi Indonesia, di mana dengan kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan Indonesia menurun.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi kurang relevan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun yang bersamaan.[6] Tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Pada tahun 2000, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 4,92% dari -13,8% dan terus meningkat secara fluktuatif tiap tahunnya hingga mencapai angkat paling tinggi pada tahun 2007, yakni 6,35%. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan situasi yang terjadi di masyarakat di mana masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan, khususnya perempuan.

Adanya budaya patriarki di Indonesia telah menciptakan perspektif di mana perempuan dipandang sebagai kaum yang lebih inferior dibanding laki-laki di mana perempuan hanya di pandang fungsinya dalam rumah tangga sehingga membatasi kesempatan perempuan untuk memasuki angkatan kerja produktif. Hal ini tentu semakin memiskinkan perempuan, selain itu adanya batasan–batasan yang dibangun terhadap akses perempuan di berbagai bidang dalam kehidupan

[6] "Profil Perekonomian Indonesia", Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2015, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21178-profil-perekonomian-indonesia (diakses pada 18 Februari 2018)

juga memperburuk kondisi perempuan dalam menghadapi kemiskinan, seperti masih minimnya akses bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik, ekonomi dan juga pendidikan. Masih minimnya akses perempuan di bidang pendidikan tidak hanya memicu terjadinya kemiskinan terhadap perempuan, namun juga berdampak pada kebijakan pembangunan. Sedikitnya jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi menyebabkan semakin sedikit pula jumlah perempuan yang berada dalam parlemen yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan–kebijakan pembangunan yang dihasilkan kurang beragam karena cenderung didominasi dengan cara pandang laki-laki yang kemudian berpeluang untuk menyebabkan terjadinya pembangunan yang bias gender.[7] Kondisi ini yang pada akhirnya memang diperlukan untuk ada dalam suatu masyarakat sesuai dengan nilai-nilai patriarki.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk memperoleh atau mencapai delapan *goal* yang dirancang melalui *Millenium Summit,* yakni *Millenium Development Goals* (2000-2015). Salah dua poin yang penting dalam *Millenium Development Goals* yang akan membantu proses penelitian ini adalah poin ke -I yang bertujuan untuk *Eradicate Extreme Poverty and Hunger* dan point ke-III yang bertujuan *Promote Gender Equality and Empower Women*. Sejauh ini upaya yang dilakukan Indonesia masih belum

[7] Kate Nethercott, Ruly Marianti and Juliet Hunt "Gender Equality Results in ADB Projects: Indonesia Country Report", *Asian Development Bank,* 2010, hlm 5 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27492/gender-equality-results-ino.pdf (diakses pada 18 Februari 2018)

berimbang dengan praktik diskriminasi gender yang ada di Indonesia.[8] Faktor lainnya adalah beragamnya fokus bagi negara dalam menjalankan fungsinya sehingga sulit untuk memperoleh spesialisasi di satu bidang tertentu, ditambah isu gender merupakan isu yang tergolong ke dalam *human security* bukan *national security* sehingga menjadi sulit untuk memperoleh perhatian penuh dari pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan peran organisasi internasional, khususnya dalam penelitian ini terfokus pada upaya Asian Development Bank (ADB) dalam memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Gender gap terjadi ketika adanya perbedaan yang dialami antar gender dalam proses pencapaian sosial, politik, intelektual, budaya dan juga ekonomi.[9] Dalam konteks pengentasan kemiskinan, didapati bahwa *gender gap* juga terjadi di Indonesia. Hal ini diindikasikan melalui masih ditemukannya perbedaan kapasitas antara perempuan dan laki-laki dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Perbedaan kapasitas ini dapat terjadi karena adanya perolehan akses yang berbeda antar gender dalam bidang politik dan juga ekonomi yang

[8] Professor Akihiko Tanaka, "Human Security: A stronger framework for a more secure future", *Human Development Reports*, 2015, http://hdr.undp.org/en/content/human-security-stronger-framework-more-secure-future (diakses pada 18 Februari 2018)

[9] Gay Young, et al, "Moving From 'The Status of Women' to 'Gender Inequality': Conceptualisation, Social Indicators, and Empirical Application", *International Sociology*, 1994, Vol. 9 No. 1, hlm 55-85, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/026858094009001005 (diakses pada 1 Oktober 2018)

disebabkan oleh kemiskinan fungsional dan juga dipengaruh oleh budaya patriarki.[10]

Dalam bidang politik, angka partisipasi perempuan dan laki-laki juga masih mengalami adanya perbedaan. Pada tahun 2004, ditemukan bahwa angka perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang politik mencapai angka 78%. Kemudian, di tahun 2006, dari seluruh pejabat perempuan di Indonesia, hanya 1% di antaranya yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dalam tingkat nasional. Di samping itu, dalam sektor pendidikan juga masih ditemukan adanya angka perbedaan partisipasi. Adanya pola pandang bahwa perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak memerlukan pendidikan yang tinggi semakin mendorong semakin sedikitnya akses pendidikan yang dapat diperoleh perempuan.[11]

Gender Partity Indeks (GPI) sebagai indikator rasio partisipasi pendidikan antar gender menunjukkan bahwa masih terjadi penurunan rasio pada tahun 2001 hingga 2005, yakni mencapai angka 0.969 (tingkat kesetaraan pada angka 1).

Dalam sektor pekerjaan formal dan non-formal, lowongan pekerjaan yang ditujukan bagi perempuan sering kali hanya di bidang yang tanpa memerlukan keahlian khusus dikarenakan adanya keterbatasan perempuan dibidang pendidikan. Hal ini kemudian yang membatasi akses perempuan

[10] Edriana Noerdin, et al, "Potret Kemiskinan Perempuan", *Women Research Institue,* 2006, hlm 35-39, https://media.neliti.com/media/publications/45071-ID-potret-kemiskinan-perempuan.pdf (diakses pada 18 Februari 2018)

[11] Astuti Rahayu, "Ketimpangan Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan,* 2005, Vol. 6 No.1, hlm 22

terhadap pekerjaan. Di samping itu para pekerja perempuan dibayar dengan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan jenis pekerjaan yang sama. Pada tahun 2002 juga masih ditemukan kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Data menunjukkan bahwa kesenjangan mencapai angka rata-rata 24.94 persen untuk kedua wilayah.[12] Adanya kesenjangan pendapatan yang dialami perempuan tentu akan semakin menyulitkan perempuan untuk dapat mengentaskan diri dari kemiskinan. Ditambah lagi, perempuan menghadapi adanya beban ganda. Kepemilikan perempuan atas pekerjaan tertentu tidak melepaskan perempuan tersebut dari tanggung jawabnya terhadap pekerjaan domestik, hal ini pada akhirnya mengharuskan perempuan untuk bekerja rata-rata lebih dari 10 jam per harinya.[13]

Dengan berlandaskan pada *Millenium Development Goals* (2000-2015) poin ke- I dan ke- III telah mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam memperkecil ketidaksetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam bidang kemiskinan.[14] Sejak 29 Juli 1980, Indonesia memang sudah menandatangani konvensi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), namun Indonesia kembali menandatangani kembali protokol opsional pada 28 Februari tahun 2000, walaupun begitu upaya Indonesia terhadap CEDAW masih sangat minim. Indonesia tidak berkomitmen penuh terhadap

[12] Viktor Pirmana, "Earnings Differential Between Male-Female in Indonesia: Evidence From Sakernas Data", *Working Paper in Economics and Development Studies,* 2006, No. 200608, hlm 12-14 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.486.5738&rep=rep1&type=pdf (diakses 18 Februari 2018)
[13] Mansour Fakih, "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
[14] "CEDAW & Women's Human Rights", *Asia and the Pacific*, http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/indonesia (diakses pada 18 Februari 2018)

pengimplementasi konvensi CEDAW, di mana Indonesia tidak ikut meratifikasi kembali CEDAW sehingga pengaplikasian konvensi CEDAW ini pun tidak dapat dimaksimalkan penuh untuk menjadi landasan hukum untuk merumuskan kebijakan nasional.

Di samping itu, Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Nasional yang secara keseluruhan berisi tentang upaya–upaya dalam menyelaraskan gender di Indonesia yang dapat mengarah pada upaya memperkecil *gender gap*.[15] Namun, tampaknya Indonesia perlu untuk melakukan upaya lebih dalam memperkecil *gender gap* di Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terlihat dari progres *Gender Development Index* (GDI) yang tidak menunjukkan adanya kesejahteraan bagi perempuan.[16] Pada tahun 2003, GDI di Indonesia mencapai angka 87 jika dibandingkan dengan HDI-nya 110, hal ini dapat terjadi karena keuntungan perempuan dalam harapan hidup lebih tidak berimbang di mana lebih rendah yaitu 83,4% sedangkan laki–laki mencapai angkat sebesar 92,5%. Kemudian, dalam perihal pendapatan, perempuan memperoleh rata - rata pendapatan jauh lebih rendah dari pada laki–laki, yakni US$2.289 untuk perempuan dan US$4.434 untuk laki–laki.

ADB sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan telah menjalin hubungan kerja sama dengan Indonesia sejak

---

[15] Uzma S. Hoque, "Summary of Indonesia's Gender Analysis", *ADB Papers on Indonesia*, 2015, No. 6, hlm. 5 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/177025/ino-paper-06-2015.pdf (diakses pada 18 Februari 2018)

[16] "Country Gender Assessment", *Asian Development Bank*, 2006, https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32231/cga-indonesia.pdf (diakses pada 18 Februari 2018)

tahun 1966 yang pada awalnya memiliki fokus utama yang tersasar pada pembangunan agraris dan infrastruktur. Pada tahun 1985, ADB menyadari bahwa untuk menciptakan kesejahteraan dan menuntaskan kemiskinan, adanya kesetaraan gender juga harus diupayakan, tidak hanya laki-laki kaum perempuan juga harus diperhatikan. ADB juga menyadari bahwa kaum perempuan juga membutuhkan kesempatan yang sama dalam hal belajar, bekerja, berkontribusi dan memperoleh penghasilan. Pada akhirnya di tahun 1998, terjadi pergeseran fokus ADB terhadap isu-isu gender di mana ADB mengadopsi suatu kebijakan terkait gender dan pembangunan dengan tujuan untuk memuat konsiderasi gender secara lintas sektor dalam setiap aspek kerja ADB. Kemudian, dimulai pada tahun 2000, ADB secara aktif mengeluarkan berbagai upaya berbasis gender di Indonesia untuk membantu memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan. [17]

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada lingkup bagaimana ADB membantu Indonesia untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui upaya-upaya yang dilakukan dan juga berbagai bentuk kerja sama lainnya.

Waktu penelitian akan dibatasi mulai dari tahun 2000 hingga 2011, penelitian ini merujuk pertama kali pada tahun 2000 dikarenakan adanya transisi

[17] "Implementation Review of the Policy on Gender and Development", *Asian Development Bank*, 2006, https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32029/gender-and-development.pdf

kebijakan dari ADB di mana konsiderasi gender diikutsertakan dalam segala aspek kerja. Kemudian, akan dibatasi hingga tahun 2011 dikarenakan upaya-upaya berbasis gender oleh ADB yang menjadi fokus dalam penelitian ini dinyatakan selesai pada tahun 2011. Dalam kurun waktu tersebut, akan dilihat bagaimana upaya ADB dapat membantu Indonesia untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan proses identifikasi dan pembatasan masalah di atas, peneliti akan memperdalam proses penelitian dengan sebuah pertanyaan penelitian : "Bagaimana upaya Asia Development Bank membantu Indonesia untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan tahun 2000-2011?"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh ADB yang bertujuan untuk memperkecil *gender gap* di Indonesia, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini akan menunjukkan kontribusi yang telah di lakukan ADB dalam memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya melalui upaya-upaya ADB berbasis gender di Indonesia selama tahun 2000-2011.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan pengetahuan lebih kepada para pembaca mengenai topik Organisasi Internasional
2. Dapat memberikan referensi lebih bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai masalah kesetaraan gender di Indonesia.
3. Menjadi referensi untuk memperlihatkan upaya–upaya ADB sebagai salah satu Organisasi Internasional dalam memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan.

1.4 Kajian Literatur

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan studi literatur untuk tujuan memperoleh referensi dan landasan dalam menyusun sistematika pembahasan mengenai upaya ADB dalam memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam buku yang berjudul "Poverty, Inequality, and Inclusive Growth in Asia: Measurement, Policy" oleh Juzhong Zhuang, telah ditunjukkan bahwa sudah terdapat upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender di Asia Pasifik terlepas berbagai dimensi yang ada, namun hanya tersentral pada bidang edukasi di mana kesehatan di sektor buruh dan pemberdayaan kapabilitas perempuan masih kurang diperhatikan

padahal *Women Economic Empowerment* dibutuhkan untuk memperoleh paritas gender.[18]

Terdapat pula artikel jurnal lain dengan judul "Gender Inequality Poverty and Human Development in South East Asia" oleh Josefa S. Francisco yang menitikberatkan bahwa ketidaksetaraan gender mengikis kepentingan dalam *human security* serta memperluas masalah dalam masyarakat yang dapat menghambat penyebaran kesempatan baik edukasi, pendapatan, kesehatan dan kesempatan lainnya di mana hal ini dapat mempersempit peluang teridentifikasinya potensi-potensi masyarakat.[19] Pemikiran inilah yang diambil oleh peneliti untuk kemudian dapat dipersempit pada masyarakat Indonesia, karna Josefa berfokus lebih luas yakni di Asia Tenggara, sama dengan apa yang dijelaskan oleh Juzhong Zhuang melalui bukunya yang hanya berfokus pada wilayah Asia Pasifik.

Peneliti juga menjadikan hasil penelitian dari Omar Suleiman yang berjudul "Non-Governmental Organization (NGOs) in Promoting Gender Equality and Women Empowerment in Rwanda A Case Study of Pro-Femmes Twese Hamwe (All of s for Women) in Nyarugene Disctrict" sebagai salah satu referensi.[20] Peneliti menggunakan sumber ini sebagai referensi untuk merumuskan penelitian, bahwa tidak hanya aktor negara saja yang boleh berperan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, namun aktor non-negara juga dapat

---

[18] Juzhong Zhuang, "Poverty Inequality, and Inclusive Growth in Asia: Measurement, Policy", *Anthem Presss*, 2011, hlm. 76-78

[19] Josefa S. Francisco, "Gender Inequality, Poverty and Human Development in South East Asia", *Society for International Development*, 2007, hlm. 103-105

[20] Omar Suleiman, "Non-Governmental Organization (NGOs) In Promoting Gender Equality and Women Empowerment in Rwanda A Case Study of Pro-Femmes Twese Hamwe (All of Us for Women) In Nyarugene District", 2011,

mengambil peran aktif, yakni peneliti akan langsung berfokus pada upaya ADB dalam memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengambil berbagai referensi konsep untuk menjadi landasan berpikir. Wendelien melalui artikel jurnalnya dengan judul "Why "Gender" Disappeared from The Gender Gap: (Re-)Introducing Gender Identity Theory to Educational Gender Gap Research" meneliti ketidaksetaraan gender melalui bidang edukasi, yang mana didapati adanya pergeseran sifat yang membuat perempuan menjadi lebih rajin untuk menuntut ilmu dibandingkan laki-laki. Namun tetap saja seberapa rajin perempuan, di dunia kerja, laki-laki menjadi lebih unggul. Hal inilah yang menyebabkan adanya bipolaritas antara maskulinitas dan feminintas, di antara keduanya Wendelien menjelaskan menggunakan *Gender Identity Theory* untuk mengelaborasi perbedaan antara kedua gender. [21]Peneliti memanfaatkan konsep *Gender Identity Theory* seperti yang dijelaskan dalam jurnal ini sebagai landasan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ketidaksetaraan gender.

Mansour Fakih, melalui bukunya dengan judul "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial" mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial (*social contruction*) dan konstruksi budaya (*cultural construction*). Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan hasil pemikiran ini untuk klasifikasi isu gender.[22]

[21] Wendelein Vantieghem, "Why "Gender" disappeared from the gender gap: (re-)introducing gender identity theory to educational gender gap research", *Springer Science*, 2014, hlm. 358-360
[22] Mansour Fakih, "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang tidak berdiri sendiri, namun terbentuk dengan adanya aspek–aspek yang muncul dari lima bidang ilmu utama, yakni ekonomi, kajian strategis, sejarah, filsafat dan hukum internasional.[23] Perkembangan Studi HI juga semakin berkembang sesuai dengan fenomena dan realita yang muncul, hal inilah yang membuat Studi HI menjadi suatu ilmu yang digolongkan interdisipliner di mana proses pembelajarannya mencakup berbagai aspek dari ilmu–ilmu lainnya, pada akhirnya menyebabkan perkembangan teori HI menjadi semakin luas dan beraneka ragam. Isu-isu HI juga semakin berkembang, tidak lagi hanya berfokus pada isu-isu kenegaraan, namun juga mulai membagi fokusnya terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan yang salah satunya menjadi isu yang dibahas dalam penelitian ini, yakni ketidaksetaraan gender dan kemiskinan.

Perkembangan isu–isu gender telah mengundang kontroversi yang berdampak pada bermunculannya berbagai aliran pemikiran feminisme, salah satunya feminisme liberal. Dalam penelitian ini hasil dari pemikiran feminisme liberal akan digunakan untuk menjadi acuan dasar dalam menganalisis upaya berbasis gender, khususnya yang dilakukan oleh ADB untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Perempuan sering kali menjadi golongan yang tertindas karena tidak adanya persamaan hak yang di dapatkan oleh perempuan seperti halnya yang didapatkan oleh laki-laki, kondisi seperti ini pada akhirnya menempatkan

[23] Robert Jackson and Georg Sorensen, "Introduction to International Relations: Theories and Approaches", Fifth Edition, Oxford University Press, 2013, hal 5-10

perempuan pada posisi subordinat. Feminisme Liberal merupakan salah satu aliran feminisme yang muncul pada abad ke-18 dan berlanjut sampai sekarang.[24] Adanya serangkaian hambatan hukum dan kebiasaan yang menghalangi masuknya perempuan ke ranah publik telah membentuk fokus utama dari feminisme liberal itu sendiri, yakni menghilangkan subordinasi perempuan.

Perbedaan gender yang terjadi di dalam masyarakat tidak disebabkan pada perbedaan aspek biologi, karena pada dasarnya tidak semua perempuan dan laki-laki itu berbeda oleh karena itu mereka tidak seharusnya diperlakukan secara berbeda pula. Lahirnya pemikiran Feminisme Liberal telah memunculkan berbagai tuntutan terhadap masyarakat. Marry Wollstonecraft sebagai seorang feminis liberal, melalui tulisannya dengan judul "Pembelaan tentang Hak Perempuan" menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama di berbagai bidang, oleh karena itu perempuan harus memiliki persamaan hak dalam bidang pendidikan.[25] Perempuan juga perlu untuk dididik sama baiknya dengan laki - laki sehingga dapat bertumbuh menjadi manusia bermoral dan mandiri.

John Stuart Mill juga menambahkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama merupakan aktor rasional sehingga perempuan juga harus mendapat pengakuan rasional sepenuhnya. [26]Di samping itu, perempuan juga harus ikut dilibatkan dalam ranah politik agar sensitivitas gender dapat diikutsertakan dalam suatu pengambilan kebijakan yang pada akhirnya akan berdampak pada

[24] Rosemarie tong, "Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction", Fourth Edition, Westview, 2014, hlm 11-12
[25] *Ibid.*, hlm 13-17
[26] *Ibid.*, hlm 23-26

berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat kultural maupun struktural. Terciptanya peluang ekonomi yang sama bagi perempuan juga tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan pada kaum perempuan.

Teori Kemiskinan Fungsional digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai kondisi di mana seorang individu maupun kelompok individu tidak memiliki keuangan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kehidupan standar yang layak dan pantas ataupun yang diharapkan.[27] Davis dan Moore (1940) menyatakan bahwa kemiskinan dan kelas sosial dalam suatu masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dihindari, hal ini dikarenakan setiap individu dalam suatu masyarakat memiliki jenis posisi dan statusnya masing-masing yang memang dibutuhkan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini didukung juga dengan adanya harapan masyarakat terhadap imbalan diferensial di mana segala imbalan atau keuntungan apa pun yang diberikan pada akhirnya akan disesuaikan sesuai dengan fungsi dan kelas sosial tiap individu. Oleh karena itu, setiap individu akan terus berlomba untuk mengembangkan fungsi dan meningkatkan kelas sosial mereka masing-masing atau dengan kata lain teori ini menyatakan bahwa akan selalu ada fungsi yang menjadi lebih rendah daripada yang lain agar fungsi dalam masyarakat dapat stabil. Pernyataan ini kemudian akan dikembangkan dalam penelitian ini untuk menggambarkan *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan. Adanya kecenderungan perempuan untuk menjadi pihak yang lebih miskin jika dibandingkan dengan laki-laki memang

[27] "Functionalist explanations of Inequalities and poverty", Theories of Poverty, hlm 83-84

dibutuhkan fungsinya dalam masyarakat. Hal ini sesuai juga dengan budaya patriarki yang berlaku di mana perempuan memang sudah seharusnya diposisikan lebih inferior dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, kondisi di mana perempuan akan selalu menjadi pihak yang lebih miskin dan lebih inferior tidak dapat terelakkan dalam suatu masyarakat tertentu.[28]

Peranan aktor lain selain negara juga dibutuhkan ketika berbicara soal isu kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, aktor yang dimaksud, antara lain adalah organisasi internasional seperti halnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ADB. Dengan demikian pemahaman mengenai organisasi internasional menjadi penting. Berdasarkan pada Clive Archer, organisasi internasional didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh perjanjian antar anggota organisasi yang berasal dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan umum anggota bersama. Cliver Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan pada tiga aspek yaitu keanggotaan, tujuan dan aktivitas serta struktur organisasi internasional.[29]

a. Keanggotaan

Negara bukan lagi menjadi aktor utama dalam dunia internasional, akan tetapi peranan aktor-aktor non negara juga dibutuhkan. Oleh karena itu, keanggotaan dalam suatu organisasi internasional juga tidak terbatas pada aktor negara saja, namun aktor non negara juga bisa ikut berpartisipasi menjadi anggota dalam suatu organisasi internasional. Terdapat dua klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, akan tetapi penelitian ini hanya akan

[28] Tracy Shildrick and Jessica Rucell, "SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES ON POVERTY", JTF Report
[29] Cliver Archer, "International Organization (London: Allen & Unwin Ltd.,) hlm 35-36

menggunakan satu klasifikasi saja yang paling relevan dan dapat menggambarkan ADB, klasifikasi yang dimaksud adalah:

(i) Intergovernmental Organization (IGO)

Suatu organisasi internasional dapat diklasifikasikan sebagai IGO ketika keanggotaannya terdiri dari negara-negara berdaulat. Namun, dalam kondisi tertentu bisa juga terdiri dari negara bagian dengan syarat negara induk memberikan izin terhadap negara bagian untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional.

b. Tujuan dan Aktivitas

Tujuan dan aktivitas juga membedakan antara satu organisasi internasional dengan yang lainnya. Tujuan dari suatu organisasi bisa jadi sangat luas maupun sangat spesifik. Kemudian, aktivitas dari suatu organisasi internasional akan menyesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tujuan dan aktivitas yang berbeda-beda, maka akan menciptakan pola hubungan yang berbeda pula di antara anggotanya. Terdapat empat kemungkinan pola hubungan yang dimaksud, yaitu:

(i) Menjalin hubungan yang *co-operative* melalui berbagai aspek seperti aktivitas perdagangan dan juga sosial.

(ii) Meminimalisir atau mencegah kemungkinan terjadinya *conflict* melalui kerjasama yang pada akhirnya menimbulkan rasa saling menghormati kepentingan nasional tiap-tiap negara.

(iii) *Confrontation,* merangsang timbulnya konflik.

c. Struktur Organisasi

Pengklasifikasian juga dilakukan dengan cara menganalisa struktur organisasi, hal ini dikarenakan setiap organisasi pasti memiliki sistem yang berbeda antara satu dengan yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Pembahasan mengenai struktur ini terdiri dari pola pemerintahan pada organisasi, pengambilan keputusan, kepemilikan sekretariat dan juga pengadaan sidang paripurna.

Organisasi Internasional juga memiliki berbagai fungsi. Menurut Karns and Mingst, terdapat enam fungsi yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional. [30] Dari keenam fungsi tersebut, hanya dua fungsi yang akan digunakan dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan keterkaitan dari fokus penelitian dengan fungsi-fungsi dari organisasi internasional yang telah dijabarkan hanya mencakup kedua fungsi tersebut. Fungsi yang pertama adalah *Rule-supervisory*, yaitu suatu OI memiliki fungsi untuk memantau dan menyelesaikan segala jenis masalah yang timbul, baik di antara negara anggota, maupun di dalam negara anggota itu sendiri. Kedua, *Operational* di mana suatu OI memiliki fungsi untuk memberikan bantuan teknis dan mengalokasikan sejumlah sumber daya kepada negara-negara anggota. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, suatu organisasi internasional memerlukan adanya sejumlah upaya. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan ADB membantu Indonesia untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan dijabarkan dalam penelitian ini sesuai dengan kedua fungsi OI tersebut.

[30] Margaret P. Karns dan Karena A. Mingst, "International Organization: The Politics and Processes of Global Governance", *Lynne Rienner Publishers*, 2004, hlm 8-10

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan memahami makna yang masih tersembunyi dalam interaksi sosial.[31] Penelitian dengan metode kualitatif disertai dengan adanya upaya-upaya, seperti proses pengumpulan data yang spesifik, penafsiran data dan analisa data secara induktif, dimulai dari topik yang umum hingga ke topik atau sub-topik yang lebih khusus. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, yakni deskriptif analisis di mana penelitian akan berfokus pada analisa keterkaitan antara subjek dan objek penelitian yang disertai dengan hubungan sebab-akibat yang didasarkan pada data berisikan fakta yang disertai juga dengan perspektif, konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dikumpulkan data primer dan sekunder.[32] Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang didapat langsung dari institusi yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data-data berisikan informasi-informasi atau bahkan analisa lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang berasal dari buku-buku teks,

[31] John W. Cresswell, "Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating and Qualitative Research", Fourth Edition, University of Nebraska-Lincoln, 2012, hal. 183
[32] *Ibid.*, hlm 83

artikel jurnal, berita, dan sumber-sumber online yang relevan dengan topik penelitian ini sehingga dapat membentuk analisa yang realistis.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang akan membahas mengenai tingkat *gender gap* dalam bidang kemiskinan di Indonesia. Pada bab ketiga, pembahasan akan mengarah kepada eksistensi, peran dan fungsi ADB di Indonesia. Dilanjutkan dengan bab keempat yang akan membahas mengenai upaya–upaya ADB membantu Indonesia untuk memperkecil *gender gap* dalam pengentasan kemiskinan. Dari keempat bab ini, akan ditarik suatu kesimpulan yang akan dimuat pada bab terakhir atau bab kelima.